



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Tim JDIH LKPP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim JDIH LKPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:
Memberikan arahan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan JDIH LKPP.
2. Penanggung Jawab:
 - a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan, dan pengembangan JDIH LKPP;
 - b. Memberikan dukungan, dan petunjuk dalam keseluruhan pelaksanaan pengelolaan, dan pengembangan JDIH LKPP; dan
 - c. Memberikan petunjuk dan bimbingan untuk mengatasi masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan, dan pengembangan JDIH LKPP.
3. Ketua Tim:
 - a. Menyusun rencana kegiatan tahunan pengelolaan, dan pengembangan JDIH LKPP;
 - b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, dan Pengembangan JDIH LKPP;
 - c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder;
 - d. Melaksanakan seluruh tahapan yang telah dirancang; dan
 - e. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada penanggungjawab untuk mendapatkan evaluasi dan saran terhadap pelaksanaan pengelolaan, dan Pengembangan JDIH LKPP.
4. Anggota Tim JDIH LKPP:
 - a. melakukan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, pembaruan, penyebarluasan, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh LKPP;
 - b. mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH Nasional (JDIHN);

- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH LKPP;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola JDIH;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi pengelola JDIH dengan Pusat JDIH Nasional dan anggota JDIH Nasional lainnya; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan JDIH setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIHN.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim JDIH LKPP bertanggung jawab kepada Kepala LKPP.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 183 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,




Ria Agustina Nasution

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENGELOLA DAN
PENGEMBANGAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 44 TAHUN 2025

TANGGAL : 19 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JDIH LKPP

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan
1	Pengarah	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2	Penanggung Jawab	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3	Ketua	Yogie Prastiyans
4	Anggota	1. Inamawati Mastuti Dewi 2. Rasmita Juliana Sitepu 3. Benny Leopold Dumais 4. Ade Wahyu Kurniawan 5. Rinatri Rahmayanti 6. Carolina Maria Anggreini 7. Asih Riska Nurmasari 8. Agus Kurdi Wijaya 9. Mahendra Gilang Ramadhynara 10. Ferial Ahmad Kurniawan 11. Apriliansyah Ariyoga 12. Dahat Riswanto 13. Feriadi 14. Adinda Puspa Hartanto 15. Salwa Nida

	16. Octari Annisa
--	-------------------

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI